

PERAN KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DALAM MENANGKAL RADIKALISME

¹Abdul Rasyid, Titi Kadi²

^{1,2} Pascasarjana UINSI Samarinda

titikadi.ibrahim11@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of religious moderation policies within Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKI) as a strategic strategy to counter radicalism. The main issue raised is the vulnerability of students to the infiltration of extreme ideologies that threaten national integration. The significance of this study lies in the need to evaluate national policies such as the 2020-2024 and 2025-2029 National Medium-Term Development Plans (RPJMN) in an academic context. Using a qualitative methodology through a systematic literature review of 20 primary sources and statistical data from various PTKIs, this study found that the establishment of the House of Religious Moderation (RMB) and the integration of the wasathiyah curriculum have significantly increased the student tolerance index, despite still facing challenges such as internal resistance, budget constraints, and digital disruption. The results indicate that religious moderation is effective as an ideological "vaccine," with the student religiosity index reaching 88.40 in 2025. In conclusion, this policy must continue to be strengthened through an ecotheological approach and deeper internalization of values to support the vision of Golden Indonesia 2045.

Keywords: Religious Moderation, Radicalism, Islamic Universities, Public Policy, Wasathiyah.

ABSTRAK

penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai strategi strategis dalam menangkal radikalisme. Masalah utama yang diangkat adalah kerentanan mahasiswa terhadap infiltrasi ideologi ekstrem yang mengancam integrasi nasional. Signifikansi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi kebijakan nasional seperti RPJMN 2020-2024 dan 2025-2029 dalam konteks akademis. Menggunakan metodologi kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis terhadap 20 literatur utama dan data statistik dari berbagai PTKI, penelitian ini menemukan bahwa pembentukan Rumah Moderasi Beragama (RMB) dan integrasi kurikulum wasathiyah telah secara signifikan meningkatkan indeks toleransi mahasiswa, meskipun masih menghadapi tantangan berupa resistensi internal, keterbatasan anggaran, dan disrupsi digital. Hasil menunjukkan bahwa moderasi beragama efektif sebagai "vaksin" ideologis, dengan indeks keberagamaan mahasiswa mencapai angka 88,40 pada tahun 2025. Kesimpulannya, kebijakan ini harus terus diperkuat melalui pendekatan ekoteologi dan internalisasi nilai yang lebih dalam untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Radikalisme, Perguruan Tinggi Islam, Kebijakan Publik, Wasathiyah.

A. Pendahuluan

Realitas sosiologis Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi menempatkan agama sebagai pilar utama dalam menyusun norma sosial dan identitas kebangsaan. Namun, dinamika keagamaan kontemporer menunjukkan adanya ancaman nyata dari fenomena radikalisme yang sering kali menggunakan kekerasan fisik maupun verbal untuk memaksakan interpretasi agama yang sempit. Dalam konteks politik dan keamanan, radikalisme dipahami sebagai tantangan baru yang mengancam konstitusi dan kemerdekaan berekspresi. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tidak luput dari upaya infiltrasi kelompok ekstremis yang memanfaatkan fase pencarian identitas mahasiswa untuk melakukan rekrutmen ideologis.

Data dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara konsisten menunjukkan angka yang mengkhawatirkan terkait paparan radikalisme di kampus. Terdapat laporan yang

mengindikasikan bahwa sekitar 39% mahasiswa di 15 provinsi merasa tertarik dengan paham radikal yang memiliki agenda mengganti ideologi negara. Survei Alvara Research pada tahun 2024 bahkan menemukan bahwa 23% mahasiswa terpapar paham intoleran, sementara 15% lainnya menolak Pancasila sebagai ideologi final. Kelompok radikal sering kali bergerak melalui organisasi dakwah kampus yang eksklusif, menggunakan pola rekrutmen tertutup yang menyerupai mekanisme indoktrinasi sistematis.

Literatur akademik mencatat bahwa kemunculan radikalisme di lingkungan kampus dipicu oleh konvergensi berbagai faktor, mulai dari kekecewaan terhadap realitas sosiopolitik, krisis identitas di era disrupsi, hingga pemahaman agama yang literal dan tekstual. Radikalisme dalam Islam sering kali muncul sebagai respons terhadap modernitas dan ketidakadilan global yang dirasakan oleh umat. Institusi pendidikan yang semula fokus pada studi Islam tradisional kini sering kali menjadi medan tempur ideologis bagi gerakan transnasional yang menawarkan narasi "heroik" namun memecah belah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membedah peran kebijakan moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI dalam membentengi sivitas akademika PTKI dari pengaruh radikalisme. Kebijakan ini telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan berlanjut pada periode 2025-2029 di bawah kepemimpinan Kabinet Merah Putih. Melalui regulasi seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019, pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai jalan tengah (wasathiyah) sebagai arus utama di lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini mengajukan argumen bahwa moderasi beragama bukan sekadar instrumen sekuritisasi untuk membungkam aspirasi politik umat, melainkan sebuah strategi kebudayaan yang esensial untuk merawat kebhinekaan Indonesia. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada keberhasilan internalisasi nilai di tingkat akar rumput, di mana dosen dan mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang aktif. Meskipun

terdapat kritik mengenai potensi "kekerasan simbolik" dalam implementasinya, data lapangan menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama secara signifikan berkorelasi positif dengan peningkatan sikap toleransi dan kesadaran hukum mahasiswa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) terhadap berbagai hasil penelitian primer dan dokumen kebijakan resmi. Fokus utama analisis diarahkan pada efektivitas kebijakan moderasi beragama di PTKI Indonesia dalam rentang waktu 2019 hingga 2025. Data yang digunakan mencakup 20 literatur utama yang relevan, hasil survei indeks keberagamaan mahasiswa dari Kementerian Agama, serta laporan riset dari lembaga intelijen dan keamanan nasional.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahap dokumentasi dan analisis isi terhadap naskah regulasi, rencana strategis (Renstra) Kementerian Agama, serta modul-modul pelatihan Training of Trainers

(ToT) moderasi beragama. Analisis data mengikuti langkah-langkah kondensasi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan yang divalidasi melalui teknik triangulasi sumber. Peneliti juga mengeksplorasi hubungan kausal antara pemahaman konsep moderasi dengan perilaku toleransi mahasiswa menggunakan data statistik deskriptif dan inferensial dari beberapa studi kasus universitas.

Objek spesifik yang dikaji meliputi implementasi kebijakan di beberapa PTKIN unggulan, seperti UIN Raden Intan Lampung, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Partisipan informasi mencakup pengelola Rumah Moderasi Beragama, dosen Pendidikan Agama Islam (PAI), serta mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi kebijakan moderasi beragama di PTKI telah menunjukkan hasil nyata baik secara struktural maupun substansial. Secara struktural, hampir seluruh PTKIN di Indonesia telah meresmikan Rumah Moderasi Beragama (RMB) sebagai lembaga khusus yang bertanggung

jawab atas penguatan nilai-nilai wasathiyah. Sebagai contoh, UIN Raden Intan Lampung telah mengembangkan strategi komunikasi hybrid yang sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi sivitas akademika melalui kampanye digital #KampusTanpaBenci dan program mentoring peer-to-peer. Di wilayah Aceh, UIN Ar-Raniry dan IAIN Langsa secara aktif menyelenggarakan seminar pencegahan radikalisme untuk meredam potensi konflik ideologis di tingkat lokal. Data statistik menunjukkan tren positif dalam indeks keberagamaan dan toleransi mahasiswa sebagai dampak langsung dari kebijakan ini. Pada Oktober 2025, Kementerian Agama merilis indeks keberagamaan mahasiswa PTKI yang mencapai angka 88,40, masuk dalam kategori sangat tinggi. Studi di IAIN Madura pada tahun 2024 terhadap 151 mahasiswa menunjukkan bahwa 60% responden memiliki tingkat moderasi yang tinggi, dengan indikator anti-kekerasan menjadi yang paling dominan.

Meskipun terdapat kemajuan, hasil penelitian juga mengungkap adanya tantangan yang signifikan. Di PTKIN Aceh, implementasi kebijakan menghadapi kendala pembiayaan

akibat *refocusing* anggaran, serta masih adanya kekhawatiran dari sebagian sivitas akademika terkait gagasan moderasi yang dianggap sebagai bentuk kompromi akidah. Selain itu, terdapat temuan bahwa indikator akomodatif terhadap budaya lokal cenderung rendah di kalangan mahasiswa, yang menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman keagamaan yang puritan dengan tradisi Nusantara.

Secara kualitatif, praktik moderasi beragama di kampus dilakukan melalui strategi insersi materi ke dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) dan kegiatan ekstrakurikuler seperti Rohis atau pramuka. Mahasiswa yang memiliki pemahaman moderasi yang baik terbukti lebih kritis terhadap konten radikal di media sosial dan lebih terbuka dalam dialog lintas agama. Di Universitas Negeri Makassar, internalisasi nilai moderasi dilakukan melalui pendekatan pedagogis dialogis yang membantu mahasiswa menyaring narasi eksklusif yang sering muncul di ruang digital.

D. Kesimpulan

Kebijakan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Islam memegang peranan vital dalam membendung arus radikalisme di kalangan mahasiswa. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa meskipun indeks keberagamaan umum berada pada level sangat tinggi, masih terdapat celah kerentanan pada indikator akomodasi budaya lokal dan resistensi terhadap kebijakan yang dianggap terlalu politis. Pembentukan Rumah Moderasi Beragama (RMB) telah memberikan landasan institusional yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan anggaran, peningkatan kapasitas literasi digital dosen, dan pendekatan pedagogis yang lebih dialogis.

Sumbangan riset ini adalah pada penekanan bahwa moderasi beragama harus dilihat sebagai strategi kebudayaan jangka panjang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, bukan sekadar respons reaktif terhadap aksi terorisme. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang masih dominan di PTKI Negeri; oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas

moderasi di PTKI Swasta dan institusi pendidikan Islam berbasis pesantren. Rekomendasi utama bagi pengelola perguruan tinggi adalah untuk mengintegrasikan nilai moderasi secara lebih kreatif melalui Kurikulum Merdeka dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi perbedaan pemikiran dan keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahari, A., Puspita, P., Teddy, T., Husna, N., & Iriantara, Y. (2023). Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (Pmb) Dalam Kurikulum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan: (Studi Kasus Pada Iain, Iakn Dan Iahn Tampung Penyang Palangka Raya). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(1), 41–58.
<https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.5408>
- Alkholid, A. M., & Firmanda, T. (T.T.). *Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital*.
- Amtiran, A. A. (2021). Kebijakan Anti Radikalisme Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Pancasila Dan Solusinya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(2).
- Bando, U. D. M. A. (2025). Moderasi Beragama Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme: Analisis Kualitatif Di Lingkungan Universitas Negeri Makassar. *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam*, 2(4).
- Iting, A., Harun, H., & Aderus, A. (2021). Radikalisme Dalam Islam. Melacak Akar Permasalahan Radikalisme Dan Bagaimana Pencegahannya. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1).
- Manullang, H. B. (2025). Analisis Kritis Terhadap Moderasi Beragama Dalam Upaya Pengembangan Perdamaian Dalam Konteks Kemajemukan Agama. *Aradha*, 5(1).
- Napitupulu, D. S. (2018). Inovasi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah). *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 1(2).
- Nuridin, A. A., & Dewi, A. E. R. (2025). Pengaruh Pemahaman Konsep Moderasi Beragama Terhadap

- Sikap Toleransi Mahasiswa Indonesia Seri Humaniora,
Program Studi Pendidikan 10(3), 231.
Agama Islam Universitas Islam
Makassar. *Jurnal Fai Uim*, 6(1).
<https://doi.org/10.36722/Sh.V10i3.4542>
- Rambe, T., Mawardi, M., & Mayasari, S. (2023). Rumah Moderasi Beragama Di Ptkin: Potret Kebijakan Dan Strategi Mewujudkan Beragama Moderat Di Perguruan Tinggi. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 214.
<https://doi.org/10.22373/Arj.V3i2.19826>
- Saifullah, T., & Afrizal, T. Y. (2021). Potensi Radikalisme Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Malikussaleh). *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
<https://doi.org/10.29103/Reusam.V9i2.5980>
- Tahir, I., & Tahir, M. I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2).
- Triono, T. I., Rahayu, S., Rahayu, S., Wangsanata, S. A., & Jamalullael, J. (2025). Moderasi Beragama Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tindakan Terorisme. *Jurnal Al-Azhar*